

KATA PENGANTAR



Manual Indikator Kinerja Tahun 2026 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Pekanbaru dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh keakuratan data capaian keberhasilan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Pekanbaru. Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Stasiun PPMHKP Pekanbaru di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Pekanbaru, Januari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Samsudin, S.E., S.Pi., M.P.

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK.1
Sasaran Program :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Utama :	Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)
Deskripsi IKU :	Definisi:
	• Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. • Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. • Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans. • Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu • Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
	Cara Pengukuran:
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer diukur dengan: $X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

	C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah √	Output Tk. Kendali Tinggi		Outcome
Sumber Data	UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir √	
Metode Cascading	Direct √	Non Direct		
Polarisasi	Maximize √	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan √	Semesteran	Tahunan

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK.2
Sasaran Kegiatan :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Utama :	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru
Deskripsi IKU :	Definisi:
	- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP, dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. - Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. - Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans. - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu - Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
	Cara Pengukurannya:
	$X = \frac{A + B + C}{3}$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan

	keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)			
Satuan Pengukuran :	Persentase			
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome	
Sumber Data	UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan ✓	Semesteran	Tahunan

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK.3
Sasaran Kegiatan :	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar
Indikator Kinerja Utama :	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru
Deskripsi IKU :	Definisi: • Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional • Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi • ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri • Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai meliputi: 1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural; 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen • ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. • Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai meliputi: 1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan Struktural 3. Persyaratan Sumberdaya 4. Persyaratan Proses 5. Persyaratan Sistem Manajemen

	Cara Pengukurannya:			
	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dengan:			
	$\bar{X} = \frac{A + B + C}{3} \times 100\%$			
	X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
	A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Presentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS)			
Satuan Pengukuran :	Persentase			
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome	
Sumber Data	UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan ✓

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK.4
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru
Indikator Kinerja Utama :	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru
Deskripsi IKU :	Definisi:
	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
	Cara Pengukurannya:
	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m
Satuan Pengukuran :	Nilai

Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome	
Sumber Data	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan	Semesteran ✓	Tahunan

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK.5			
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun PPMHKP Peknabru			
Indikator Kinerja Utama :	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
Deskripsi IKU :	Definisi:			
	Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.			
	Formula Perhitungan:			
	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :			
	a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.			
Satuan Pengukuran :	Nilai			
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome	
Sumber Data	Inpektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan ✓

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK. 6																										
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabe di lingkup Stasiun PPMHKP Peknabru																										
Indikator Kinerja Utama :	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru																										
Deskripsi IKU :	Definisi:																										
	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																										
	Formula Perhitungan:																										
	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>				Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan	A	>80 - 90	Memuaskan	BB	>70 - 80	Sangat Baik	B	>60 - 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 - 50	Kurang	D	0 - 30
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 - 90	Memuaskan																									
BB	>70 - 80	Sangat Baik																									
B	>60 - 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 - 50	Kurang																									
D	0 - 30	Sangat Kurang																									
Satuan Pengukuran :	Nilai																										
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah √	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome																								
Sumber Data	Inpektorat Jenderal																										
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir √																								
Metode Cascading	Direct √	Non Direct																									
Polarisasi	Maximize √	Minimize	Stabilize																								
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan √																							

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK. 7			
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun PPMHKP Peknabru			
Indikator Kinerja Utama :	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
Deskripsi IKU :	Definisi:			
	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.			
	Formula Perhitungan:			
	$\frac{Jumlah\ rekomndasi\ Itjen\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklanjuti\ oleh\ Unit\ Kerja}{Jumlah\ rekomndasi\ yang\ diberikan\ kepada\ Unit\ Kerja} \times 100\%$			
Satuan Pengukuran :	Persen			
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome	
Sumber Data	Inpektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata ✓	Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan ✓	Semesteran	Tahunan

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK. 8																														
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun PPMHKP Peknabru																														
Indikator Kinerja Utama :	Inikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru																														
Deskripsi IKU :	Definisi:																														
	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																														
	Formula Perhitungan:																														
	$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1K/L - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.																														
	<table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2.</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4.</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5.</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7.</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8.</td><td>Capaian output</td><td>25</td></tr></table>				No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1.	Revisi DIPA	10	2.	Deviasi RPD	15	3.	Penyerapan Anggaran	20	4.	Belanja Kontraktual	10	5.	Penyelesaian Tagihan	10	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10	7.	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8.	Capaian output	25
	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1.	Revisi DIPA	10																													
2.	Deviasi RPD	15																													
3.	Penyerapan Anggaran	20																													
4.	Belanja Kontraktual	10																													
5.	Penyelesaian Tagihan	10																													
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10																													
7.	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																													
8.	Capaian output	25																													
Satuan Pengukuran :	Nilai																														
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome																												
Sumber Data	Kementerian Keuangan																														
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓																												
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct																													
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize																												
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan	Semesteran ✓	Tahunan																											

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK. 9												
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun PPMHKP Peknabru												
Indikator Kinerja Utama :	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru												
Deskripsi IKU :	Definisi:												
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.												
	Formula Perhitungan:												
	NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut :												
	<table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektifitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table> $NKPA_{UEI} = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker			Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektifitas Satker	45	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker
Variabel	Uraian	Bobot (%)											
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30											
	2. Nilai Efektifitas Satker	45											
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25											
Satuan Pengukuran :	Nilai												
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome										

Sumber Data	Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan ✓

Manual IKU Level I SPPMHKP Pekanbaru	IK. 10			
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
Indikator Kinerja Utama :	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru			
Deskripsi IKU :	Definisi:			
	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.			
	Formula Perhitungan:			
	$\frac{\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%}{}$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.			
Satuan Pengukuran :	Persen			
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah ✓	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome	
Sumber Data	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan ✓	Semesteran	Tahunan

Manual IKU SPPMHKP Pekanbaru	IK. 11		
Sasaran Program :	Tatakelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru		
Indikator Kinerja Utama :	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru		
Deskripsi IKU :	Definisi:		
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. - Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP		
	Cara Pengukuran:		
	Bobot Nilai rata-rata terhitung = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} 0,111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25		
Satuan Pengukuran :	Indeks		
Tingkat Validitas IK	Output Tk. Kendali Rendah √	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome
Sumber Data	BPPMHKP		

Jenis Perhitungan Data	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir ✓	
Metode Cascading	Direct ✓	Non Direct		
Polarisasi	Maximize ✓	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	Bulanan	Triwulanan ✓	Semesteran	Tahunan